



Perubahan Dana Desa 2020

# Langsung Masuk ke Rekening Desa

**SAMBAS** - Sesuai aturan PMK Nomor 205 Tahun 2019, desa akan menerima langsung dana desa dari Kas Negara mulai tahun ini.

Namun demikian, sejumlah persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu oleh desa.

◆ Ke Halaman 19 Kolom 1

## Langsung Masuk ke Rekening Desa

*Sambungan dari halaman 17*

"Iya (penyaluran dana desa langsung dari kas negara) sejalan dengan ketentuan di PMK 205/2019," kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Sambas, Apriyandi, Selasa (18/2).

Bahkan, di Kabupaten Sambas belum lama ini sudah ada desa yang diusulkan untuk penyaluran.

"Beberapa waktu lalu ada desa yang sudah diusulkan untuk penyaluran, bahkan sudah menerima transfer dari kas negara. Kalau dijumlah ada sekitar sembilan desa yang sudah salur," katanya.

Mekanisme penyaluran, dimulai tahun ini. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Sambas melalui

Dinsos PMD dan jajaran terkait, akan mengusulkan desa-desa mana saja yang memenuhi syarat untuk salur.

"Ada pengusulan, dan ini (yang diusulkan) adalah desa-desa yang sudah memenuhi persyaratan. Karena ketentuan salur dari RKUN ke RKD berlaku untuk semua desa. Cuma yang diusulkan sesuai dengan kelayakan salur desa, karena setiap tahap penyaluran ada persyaratan yang harus dipenuhi," katanya.

Disampaikan Apriyandi, pada dasarnya mekanisme penyaluran ini, sama dengan yang sebelumnya.

"Sama macam yang sebelumnya. Tetap ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran. Hanya bedanya tahun ini, penyaluran langsung dari kas negara," katanya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan Menkeu dan Mendes sepakat, di 2020 ini dana desa langsung ditransfer ke rekening desa. Ini untuk menjamin kecepatan dan akurasi dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa.

Mantan Kapolri tersebut menyampaikan, dana desa sangat penting agar bisa segera dikelola oleh desa, sesuai mekanisme yang ada.

Diharapkan, dana desa dapat memperkuat ketahanan ekonomi desa. Dan diharapkan dana desa dapat dialokasikan pada sektor produktif. Terlebih, besaran dana desa pada 2020 mengalami peningkatan secara signifikan menjadi Rp72 triliun dari yang sebelumnya pada 2019 hanya Rp70 triliun.

Tito menyebut, APBN dan APBD akan menjadi instrumen ekonomi yang harus digunakan secepatnya.

Terlebih, dana desa akan dipercepat pencairannya dan langsung ditransfer dari pusat ke daerah untuk digunakan sebagai pendukung program padat karya di desa. Program padat karya akan menyedot lapangan kerja sehingga otomatis akan menjaga perputaran uang di desa dan juga menjaga daya beli masyarakat desa.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini pun menuturkan, pada 2020 dana desa akan meningkat dengan rata-rata alokasi dana per desa mencapai Rp 960 juta. Bahkan rantai birokrasi pencairan dengan cara transfer dari kas Umum negara langsung ke rekening desa. (fah)